



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PENGELUARAN
2016 - 2020**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ROKAN HULU**



<https://rohuilab.bps.go.id>

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PENGELUARAN 2016 - 2020

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran, 2016-2020

ISBN	: 978-602-5462-62-7
No. Publikasi	: 14070.2103
Katalog BPS	: 9302023.1407
Ukuran Buku	: 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman	: xii + 66 halaman
Naskah	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu
Gambar Kulit	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu
Diterbitkan Oleh	: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu : pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori) serta Net Ekspor. Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Terakhir, disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Pasir Pengaraian, April 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Rokan Hulu



Hari Prasetyo, SST, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB).....	3
1.2 KEGUNAAN DATA PDRB.....	5
II BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA.....	7
2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT).....	9
2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT).....	13
2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P).....	15
2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB).....	18
2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI).....	23
2.6 EKSPOR DAN IMPOR BARANG SERTA JASA.....	27
III BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN 2016-2020.....	29
3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PENGELUARAN.....	32
3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA.....	39
3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT.....	42
3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH.....	43
3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO.....	44
3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI.....	46
3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR.....	47
IV BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PENGELUARAN 2016-2020.....	49
4.1 PDRB (NOMINAL).....	51
4.2 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB.....	52
4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR).....	53
V PENUTUP.....	55
VI LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

		Halaman
1	PDRB Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2016-2020.....	32
2	PDRB Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2016-2020.....	33
3	Distribusi PDRB Kabupaten Rokan Hulu ADHB Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020.....	35
4	Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020.....	35
5	Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020.....	37
6	Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (2010=100), 2016-2020.....	37
7	Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020.....	38
8	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020.....	39
9	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu (persen), 2016-2020.....	40
10	Pertumbuhan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu (persen), 2016-2020.....	41
11	Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu (persen), 2016-2020.....	42
12	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRK Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020.....	42
13	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020.....	44
14	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020.....	45
15	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020.....	46
16	Perkembangan dan Struktur Net Ekspor Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020.....	48
17	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020.....	51
18	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020.....	53
19	<i>Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020.....</i>	54

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1 Perbandingan PDRB Kabupaten Rokan Hulu ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2016-2020.....	34

<https://rohulkab.bps.go.id>

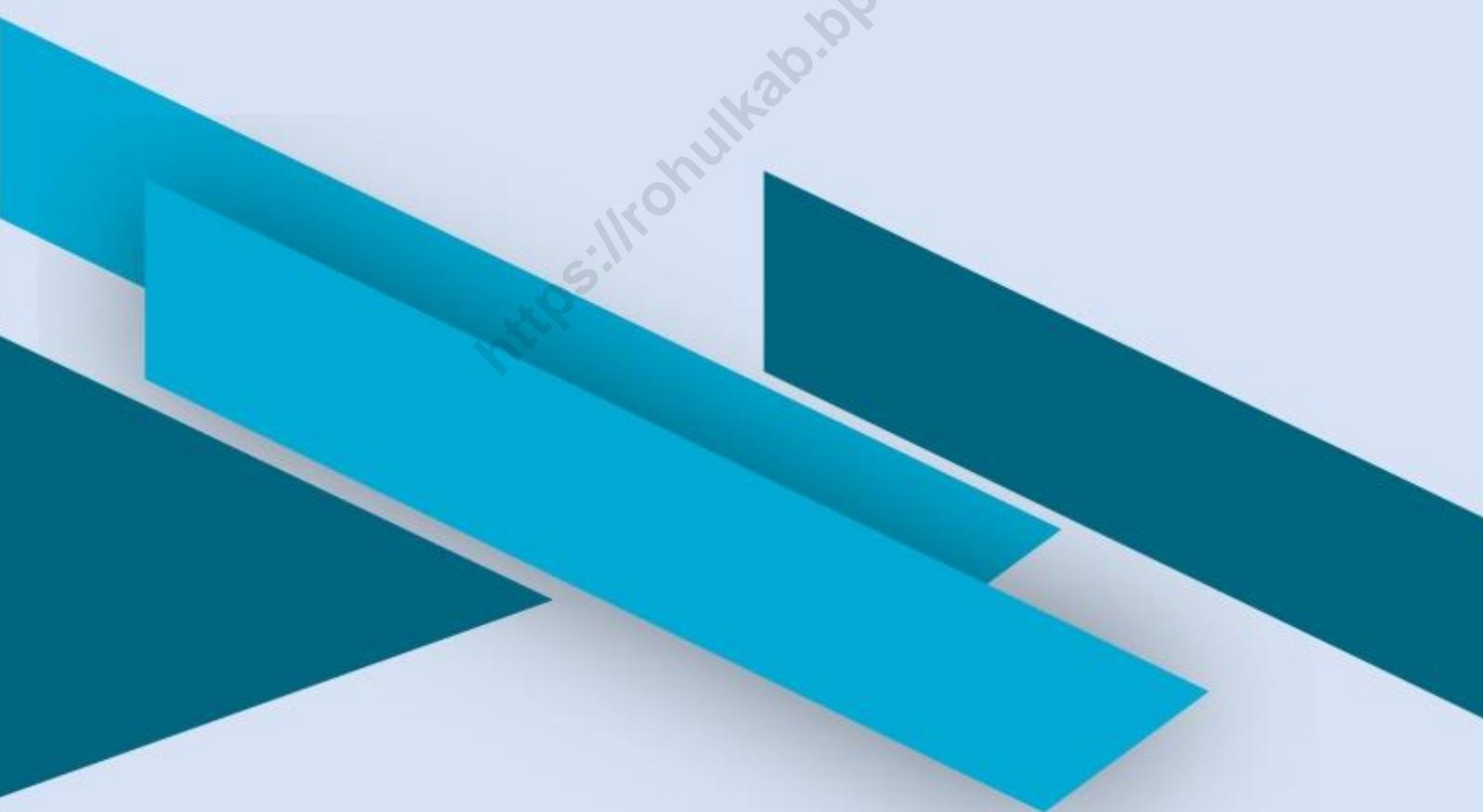
DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2016-2020.....	61
2 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2016-2020.....	62
3 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020.....	63
4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020.....	64
5 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (2010=100), 2016-2020.....	65
6 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

<https://rohulkab.bps.go.id>



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

1. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga
2. Pengeluaran konsumsi akhir lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga
3. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah
4. Pembentukan modal tetap bruto
5. Perubahan inventori
6. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2. KEGUNAAN DATA PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

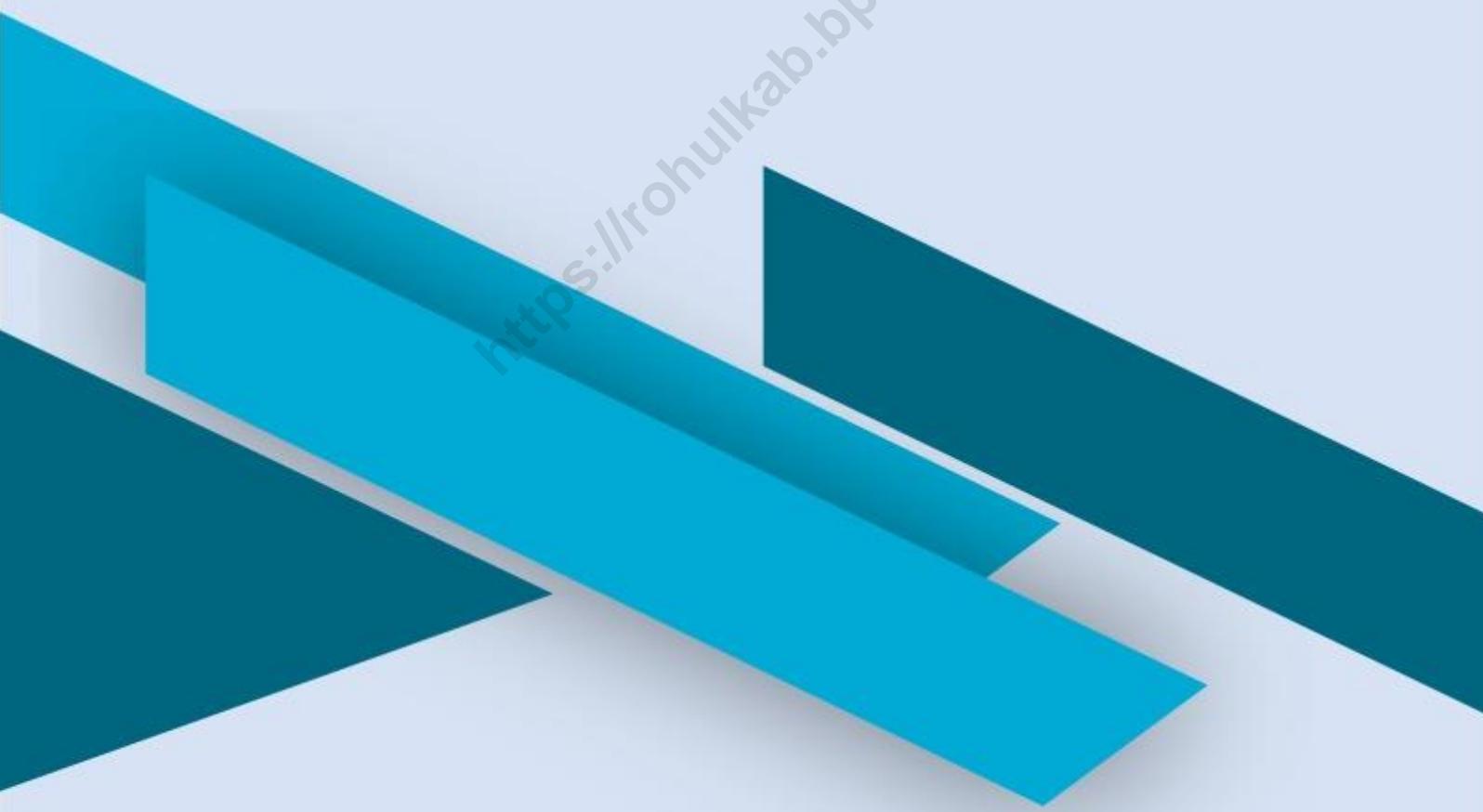
1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha ekonomi dalam suatu wilayah. Lapangan usaha ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri dan antardaerah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar negeri maupun antardaerah.

7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk di suatu wilayah.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://rohulkab.bps.go.id>

BAB II ***METODE ESTIMASI DAN*** ***SUMBER DATA***

<https://rohulkab.bps.go.id>



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PKRT)

I. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

II. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

III. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption According to Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UNSD (*United Nations Statistics Division*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau, dan narkotika
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga, dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan

7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya tujuh COICOP, yaitu:

1. Makanan, minuman, dan rokok
2. Pakaian dan alas kaki
3. Perumahan, perkakas, perlengkapan, dan penyelenggaraan rumah tangga
4. Kesehatan dan pendidikan
5. Transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya
6. Hotel dan restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

IV. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan
- Jumlah penduduk pertengahan tahun
- Data sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas yang dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator suplai dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil

adjustment, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sebagai berikut:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data pada poin kesatu dikelompokkan menjadi tujuh kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
3. Terhadap data poin kedua dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun indeks implisit berdasarkan IHK Kota (Kabupaten/kota terdekat);
6. PKRT ADHK 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin keempat dengan hasil poin kelima.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

I. Pendahuluan

Sektor Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

II. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga nonprofit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus
- Istilah nonprofit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud di sini adalah yang

bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas tujuh jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

III. Cakupan

Nilai Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sama dengan nilai output nonpasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output nonpasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimile, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain
- Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus, dan tunjangan lainnya
- Penyusutan
- Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bea Balik Nama (BBN), dan lain-lain.

IV. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber Data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Nonprofit (SKLNP). Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil pemutakhiran (*updating*) direktori LNPRT. Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode Penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT ADHB

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3. PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

I. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu wilayah/negara. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak

atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi nonpasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

II. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan, contoh: aktivitas pencetakan publikasi, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, contoh: aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, serta tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan nonkomoditas (pendapatan jasa).

III. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Kabupaten, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Kabupaten mencakup: a. PK-Pemerintah Kabupaten; b. PK-Pemerintah provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten yang bersangkutan; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah kabupaten bersangkutan.

IV. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Kabupaten Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Pemerintah Daerah)
- c. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Upah dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Kabupaten Atas Dasar Harga Berlaku

Secara umum, PK-P ADHB dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P Atas Dasar Harga Berlaku} = \text{Output nonpasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output nonpasar dihitung dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten, PK-P Kabupaten ADHB dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten itu sendiri + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan yang ada di wilayah kabupaten tersebut + pengeluaran

pemerintah provinsi yang menjadi bagian dari kabupaten yang bersangkutan + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari kabupaten yang bersangkutan.

b. PK-P Kabupaten Atas Dasar Harga Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. *Deflator* yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, indeks upah, indeks implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan Indeks Harga Konsumen (IHK) Umum.

2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

I. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah/negara. Investasi di sini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

II. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*consumption of fixed capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

III. Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset nonfinansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

IV. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut lapangan usaha konstruksi.
- b. Nilai impor dua digit *Harmonized System* (HS), yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Industri Kecil dan Rumah Tangga (level Kabupaten).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level Kabupaten.

- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan nonmigas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas, dan Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data eksplorasi mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
- k. Statistik Peternakan dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai lapangan usaha ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan arus komoditas. Dalam hal ini penyediaan atau *supply* dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB ADHB tersebut di-*deflate* (dibagi) dengan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik dan impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pendekatan pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADHB. Untuk memperoleh nilai ADHK adalah dengan men-*deflate* PMTB ADHB dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara ekstrapolasi atau mengalikan PMTB ADHK dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADHK terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADHB, nilai PMTB ADHK tersebut di-*inflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADHK di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan dua cara.

Pertama, PMTB ADHB diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan, dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADHK adalah dengan cara men-*deflate* PMTB ADHB dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADHB untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di lapangan usaha pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADHB dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADHK diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit dari PDRB lapangan usaha pertambangan. Selain itu, data dari Kementerian ESDM dan SKK Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADHB diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang piranti lunak (*software*). Untuk ADHK diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit lapangan usaha jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADHK diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai ADHB dengan indeks implisit lapangan usaha jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*trade and transport margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi

yang diperoleh dari sumber data tertentu itu terlalu lama.

2.5. PERUBAHAN INVENTORI (PI)

I. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

II. Konsep dan Definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi sehingga perlu pencadangan, baik dalam bentuk bahan baku atau bahan

penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

III. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut lapangan usaha, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen, atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai,

gula pasir, dan gandum.

IV. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data inventori publikasi tahunan Industri Besar dan Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB lapangan usaha terpilih, dan
- Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, dan ternak dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.

2. Metode Penghitungan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- Menghitung posisi inventori ADHK, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori ADHK dengan mengurangi posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- Menghitung perubahan inventori ADHB dengan meng-*inflate* perubahan inventori ADHK dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADHB diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADHK dihitung dengan: a. Men-*deflate* nilai perubahan inventori ADHB dengan indeks harga yang sesuai; b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi dalam menghitung komponen perubahan inventori adalah:

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara melakukan *mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk lapangan usaha yang datanya tidak tersedia.

2.6. EKSPOR DAN IMPOR BARANG SERTA JASA

I. Pendahuluan

Aktivitas ekspor impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah lain atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestiknya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

II. Konsep dan Definisi

Ekspor impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah, ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

III. Cakupan

Ekspor Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari Kabupaten tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari Kabupaten tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya.

- c. Net ekspor antardaerah
 - Ekspor antardaerah
 - Impor antardaerah

IV. Penghitungan Ekspor Impor Tahunan

1. Sumber data

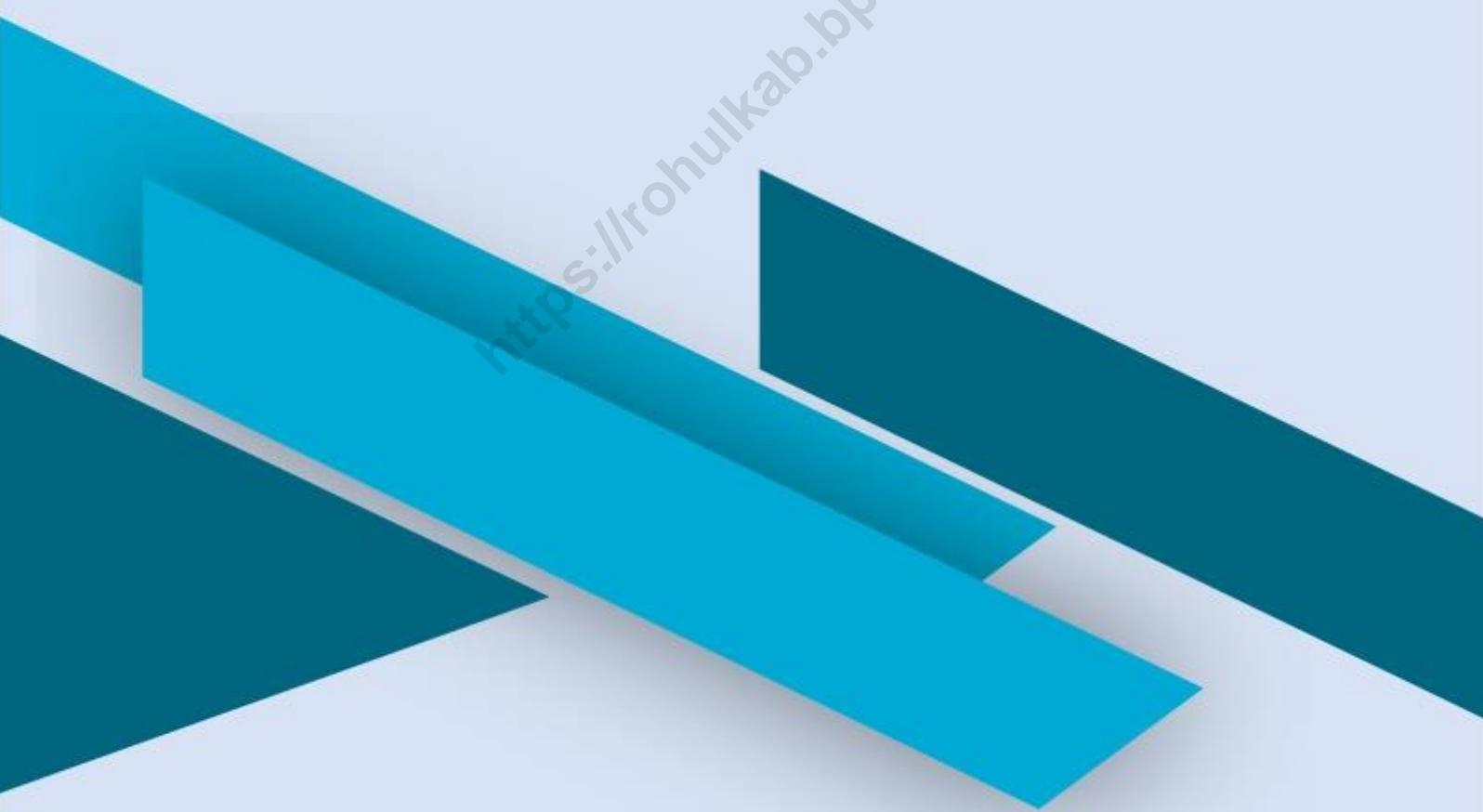
- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu lintas barang yang keluar masuk Kabupaten di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu lintas barang yang keluar masuk Kabupaten dari hasil survei
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di samping itu, nilai ekspor impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non-residen. Sedangkan net ekspor antardaerah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB Lapangan Usaha dengan PDRB Pengeluaran.

BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN ROKAN HULU
BERDASARKAN PDRB
PENGELUARAN 2016-2020

<https://rohulkab.bps.go.id>



Dinamika ekonomi makro di tingkat global, nasional maupun di tingkat Provinsi Riau secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kondisi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu. Kondisi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu sendiri juga tidak terlepas dari adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat transaksi perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Rokan Hulu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga/LNPRT, dan pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB dan perubahan inventori).

Di masa pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,51%. Hal ini dikarenakan beberapa komponen PDRB pengeluaran mengalami kontraksi seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Namun di sisi lain, komponen net ekspor mampu sedikit menyelamatkan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu. Sektor perkebunan yang menopang perekonomian Kabupaten Rokan Hulu seperti perkebunan kelapa sawit, tidak rentan dipengaruhi pandemi COVID-19. Permintaan ekspor CPO (*Crude Palm Oil*) yang meningkat pada tahun 2020 turut mempengaruhi kenaikan net ekspor Kabupaten Rokan Hulu.

3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Rokan Hulu secara makro dapat digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK), serta pertumbuhan pada total PDRB. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 melemahkan perekonomian sebagian besar daerah di Indonesia. Meskipun demikian, Kabupaten Rokan Hulu terbilang cukup mampu bertahan dari dampak pandemi COVID-19.

Tabel 1. PDRB Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2016-2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	18 903,48	20 481,89	21 810,49	23 188,24	23 749,15
2. Konsumsi LNPRT	223,82	243,63	275,53	326,05	335,05
3. Konsumsi Pemerintah	1 366,53	1 408,21	1 445,67	1 590,74	1 631,31
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7 552,02	8 042,82	8 590,87	9 091,18	9 017,30
5. Perubahan Inventori	544,26	211,96	314,93	321,94	85,18
6. Net Ekspor	555,50	603,79	-147,31	-635,91	1 265,72
PDRB	29 145,61	30 992,30	32 290,19	33 882,24	36 083,71

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Terlihat pada Tabel 1, nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga berlaku selama periode tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Dari sisi *demand*, hingga saat ini ekonomi Kabupaten Rokan Hulu masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga, disusul dengan PMTB, konsumsi pemerintah, net ekspor, konsumsi LNPRT dan perubahan inventori. Sedangkan komponen pengeluaran yang mengalami peningkatan terbesar di tahun 2020 adalah net ekspor. Hal ini dikarenakan terjadinya kenaikan permintaan CPO (*Crude Palm Oil*) di pasar dunia tahun 2020 ikut berkontribusi terhadap kenaikan net ekspor Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel 2. PDRB Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (miliar rupiah),
2016-2020**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	12 269,23	12 962,53	13 562,12	14 030,81	13 934,78
2. Konsumsi LNPRT	152,96	159,50	173,71	198,95	200,25
3. Konsumsi Pemerintah	930,25	935,98	940,38	966,05	892,54
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 295,40	4 493,38	4 743,92	4 902,82	4 817,27
5. Perubahan Inventori	200,34	143,33	117,36	142,86	228,68
6. Net Ekspor	3 944,78	4 270,73	4 388,20	4 860,15	5 406,36
PDRB	21 792,97	22 965,45	23 925,69	25 101,65	25 479,88

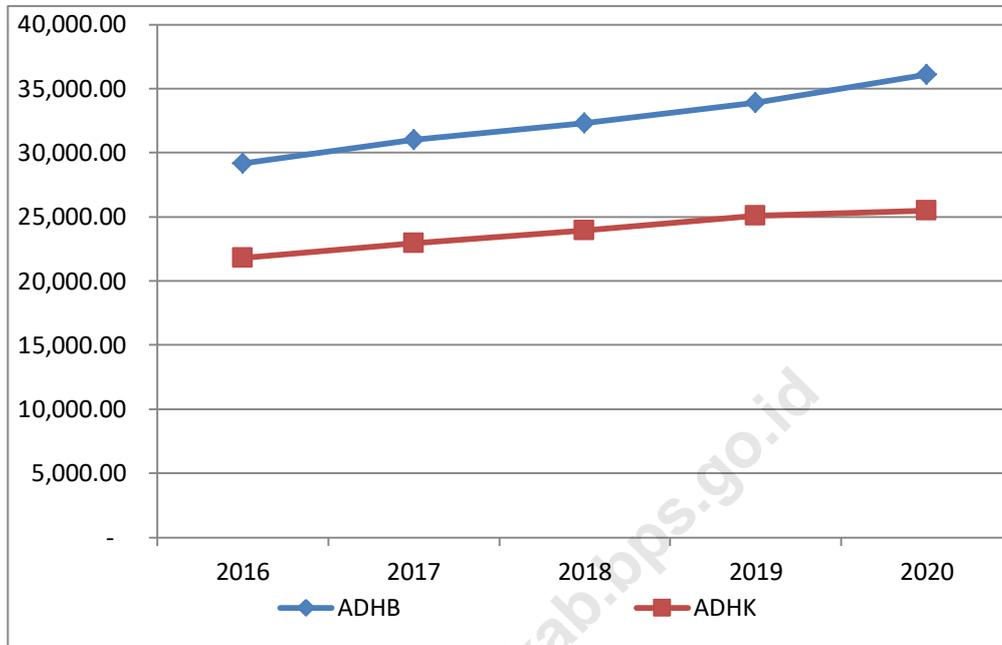
*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan atau berbagai produk barang dan jasa yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan ADHK, PDRB masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan volume barang dan jasa yang digunakan atau secara kuantitas saja, tanpa ada pengaruh perubahan harga. Komponen PDRB pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, terutama yang berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2016-2020, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan PDRB ADHK dapat dilihat pada Tabel 2 di atas. Dalam lima tahun terakhir, nilai PDRB Kabupaten Rokan Hulu atas dasar harga konstan 2010 mengalami pertumbuhan yang positif dengan kontribusi terbesar adalah pada komponen konsumsi rumah tangga.

Pada umumnya nilai PDRB ADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah ditiadakan. Grafik berikut ini menunjukkan perbandingan PDRB ADHB dan ADHK 2010 Kabupaten Rokan Hulu menurut pengeluaran tahun 2016-2020.

Grafik 1. Perbandingan PDRB Kabupaten Rokan Hulu ADHB dan ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2016-2020



Terbentuknya keseluruhan PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluaran, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga, konsumsi akhir LNPRT, konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), perubahan inventori dan ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor. Secara keseluruhan, peran konsumsi rumah tangga dalam PDRB pengeluaran masih dominan dibandingkan kelima komponen lainnya. Hal ini menjadi catatan bagi pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang didominasi komponen konsumsi akhir (konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah) akan kurang menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, perekonomian daerah perlu didukung dengan kegiatan investasi di sektor produksi dan jasa. Selain memperluas kesempatan kerja, investasi juga dapat mendorong kemajuan teknologi sehingga meminimalisir penggunaan ongkos produksi dan penggunaan sumber daya alam, serta memperluas ekspansi pasar yang nantinya juga akan menaikkan kegiatan ekspor.

Tabel 3. Distribusi PDRB Kabupaten Rokan Hulu ADHB Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	64,86	66,09	67,55	68,44	65,82
2. Konsumsi LNPRT	0,77	0,79	0,85	0,96	0,93
3. Konsumsi Pemerintah	4,69	4,54	4,48	4,69	4,52
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,91	25,95	26,61	26,83	24,99
5. Perubahan Inventori	1,87	0,68	0,98	0,95	0,24
6. Net Ekspor	1,91	1,95	-0,46	-1,88	3,51
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2016-2020, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik, antara 64-68 persen digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga. Di sisi lain, pengeluaran untuk investasi (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 24-26 persen. Sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah relatif kecil yaitu sekitar empat persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik masih relatif kecil.

Tabel 4. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu ADHK 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6,05	5,65	4,63	3,46	-0,68
2. Konsumsi LNPRT	2,44	4,27	8,91	14,53	0,65
3. Konsumsi Pemerintah	2,21	0,62	0,47	2,73	-7,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,36	4,61	5,58	3,35	-1,74
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	4,77	5,38	4,18	4,92	1,51

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dari tahun 2016-2020 secara rata-rata mencapai 4,15 persen. Selama periode tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu cenderung mengalami peningkatan, meskipun pergerakannya melambat pada tahun 2020 yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Dari enam komponen PDRB pengeluaran, tiga komponen mengalami penurunan seperti konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Pandemi COVID-19 turut melemahkan daya beli masyarakat yang menyebabkan pengeluaran rumah tangga diprioritaskan pada kebutuhan bahan makanan serta komunikasi untuk kegiatan *Work From Home* (WFH) dan *School From Home* (SFH) sehingga pengeluaran pada komponen yang lain menjadi berkurang. Adanya kebijakan untuk tidak memberikan THR kepada pejabat eselon 1 dan 2, pengurangan nilai THR (tanpa tunjangan kinerja) serta *refocussing* anggaran pemerintah dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 menyebabkan menurunnya konsumsi pemerintah. Selain itu, terjadinya penurunan pembelian kendaraan untuk usaha/kantor, serta penundaan kegiatan pembangunan/perbaikan besar bangunan tempat tinggal menyebabkan nilai PDRB komponen pembentukan modal tetap bruto menjadi turun pada tahun 2020.

Selain pertumbuhan yang dirinci menurut komponen pengeluaran, juga dapat diturunkan lagi tabel sumber pertumbuhan yang menggambarkan komponen yang sangat dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan di suatu daerah. Secara umum pada tahun 2020, komponen net ekspor menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dipicu oleh meningkatnya permintaan luar negeri terhadap CPO (*Crude Palm Oil*) yang menjadi komoditas utama Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel 5. Sumber Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rokan Hulu
Menurut Pengeluaran (persen),
2016-2020**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,37	3,18	2,61	1,96	-0,38
2. Konsumsi LNPRT	0,02	0,03	0,06	0,11	0,01
3. Konsumsi Pemerintah	0,10	0,03	0,02	0,11	-0,29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	0,86	0,91	1,09	0,66	-0,34
5. Perubahan Inventori	0,11	-0,26	-0,11	0,11	0,34
6. Net Ekspor	0,31	1,50	0,51	1,97	2,18
PDRB	4,77	5,38	4,18	4,92	1,51

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Dari uraian di atas diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hulu dari sisi *demand* digerakkan secara dominan oleh net ekspor. Meskipun demikian, pertumbuhannya melambat dikarenakan pada tahun 2020, komponen konsumsi rumah tangga yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB pengeluaran mengalami kontraksi sebesar minus 0,38 persen disusul PMTB yang berkontraksi minus 0,34 persen serta konsumsi pemerintah yang berkontraksi sebesar minus 0,29 persen.

**Tabel 6. Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Rokan Hulu
Menurut Pengeluaran (2010=100),
2016-2020**

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	154,07	158,01	160,82	165,27	170,43
2. Konsumsi LNPRT	146,33	152,75	158,62	163,89	167,32
3. Konsumsi Pemerintah	146,90	150,45	153,73	164,66	182,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	175,82	178,99	181,09	185,43	187,19
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	133,74	134,95	134,96	134,98	141,62

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan perubahan harga yang wajar.

Jika dilihat pertumbuhan indeks implisitnya pada Tabel 7 dan sejalan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK), baik secara total PDRB maupun per komponennya masih dalam batas kewajaran. Secara total, selama periode 2016-2020, pertumbuhan indeks implisit berfluktuasi yaitu masing-masing sebesar 3,39 persen, 0,91 persen, 0,01 persen, 0,01 persen, dan 4,92 persen.

Sedangkan secara komponen pengeluaran, selama periode 2016-2020, komponen pengeluaran yang pertumbuhan harga implisitnya mencapai dua digit, adalah komponen pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2016, yaitu sebesar 14,79 persen, serta komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 18,72 persen pada tahun 2016.

Tabel 7. Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,13	2,55	1,78	2,77	3,12
2. Konsumsi LNPRT	4,17	4,39	3,84	3,32	2,09
3. Konsumsi Pemerintah	14,79	2,42	2,18	7,11	11,00
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	18,72	1,81	1,17	2,39	0,95
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	3,39	0,91	0,01	0,01	4,92

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

¹ Indeks Perkembangan

3.2. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga mendominasi lebih dari setengah total PDRB Rokan Hulu, yaitu sekitar 64-68 persen. Untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga, dibutuhkan produk domestik dan impor. Tabel 8 menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2016-2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK). Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan secara riil (ADHK).

Tabel 8. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (miliar rupiah)	18 903,48	20 481,89	21 810,49	23 188,24	23 749,15
b. ADHK (miliar rupiah)	12 269,23	12 962,53	13 562,12	14 030,81	13 934,78
Proporsi terhadap PDRB (%)	64,86	66,09	67,55	68,44	65,82
Rata-rata konsumsi per-Kapita (juta rupiah)					
a. ADHB (juta rupiah)	30,66	31,94	32,73	33,50	33,06
b. ADHK (juta rupiah)	19,90	20,22	20,35	20,27	19,40
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi Rumah Tangga	6,05	5,65	4,63	3,46	-0,68
b. Perkapita	1,89	1,57	0,67	-0,39	-4,31
Jumlah penduduk (orang)	616 466	641 208	666 410	692 120	718 321

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Apabila dilihat dari sisi kuantitas (riil) terjadi penurunan rata-rata konsumsi, baik per rumah tangga maupun per kapita. Secara total, selama tahun 2016-2019 pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADHK selalu mengalami perlambatan hingga akhirnya berkontraksi pada tahun 2020 sebesar minus 0,68 persen. Sebanding dengan hal tersebut, pertumbuhan perkapita pada tahun 2016-2018 terus mengalami perlambatan hingga akhirnya berkontraksi di tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar minus 0,39 persen dan minus 4,31 persen.

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK)

Dari tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, peningkatan konsumsi rumah tangga secara riil (minus 0,68 persen) berbanding terbalik dengan peningkatan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Hal ini dapat memberikan indikasi bahwa ada perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

Tabel 9. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu (persen), 2016-2020³

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	46,10	46,99	48,00	48,63	51,71
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,92	3,93	3,84	3,81	3,56
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,56	9,64	9,56	9,47	9,39
d. Kesehatan dan Pendidikan	6,35	6,28	6,22	6,18	6,48
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	28,20	27,32	26,59	26,16	23,70
f. Hotel dan Restoran	2,90	2,93	2,91	2,90	2,26
g. Lainnya	2,96	2,91	2,87	2,86	2,91
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Dihitung menurut angka dasar harga berlaku (ADHB), secara rata-rata kontribusi pengeluaran untuk makanan cenderung meningkat setiap tahunnya, yaitu 46,10 persen (2016); 46,99 persen (2017); 48,00 persen (2018); 48,63 persen (2019); dan 51,71 persen pada tahun 2020. Sementara itu, struktur konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu selama tahun 2016-2019 masih didominasi oleh konsumsi bukan makanan (gabungan kelompok konsumsi b sampai g). Konsumsi nonmakanan tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan, dan sebagainya.

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

Namun, pada tahun 2020, struktur konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Rokan Hulu beralih menjadi dominan konsumsi makanan. Hal ini dikarenakan selama pandemi COVID-19, masyarakat cenderung menggeser prioritas konsumsinya pada kebutuhan bahan makanan.

Tabel 10. Pertumbuhan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu (persen), 2016-2020

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	8,41	7,51	6,75	4,92	4,69
b. Pakaian dan Alas Kaki	5,35	2,91	2,19	1,95	-6,85
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,59	4,75	3,57	3,14	0,08
d. Kesehatan dan Pendidikan	6,18	3,42	4,51	3,03	5,10
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	2,66	4,17	2,08	1,44	-8,85
f. Hotel dan Restoran	5,24	4,73	3,85	3,29	-21,03
g. Lainnya	5,91	3,92	2,64	2,28	-2,78

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan ADHK, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan selama tahun 2016 sampai dengan 2020 cenderung melambat. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 4,69 persen dan tertinggi pada tahun 2016 sebesar 8,41 persen. Sedangkan untuk nonmakanan pertumbuhannya dalam kurun waktu 2016-2020 bervariasi untuk semua kelompok pengeluaran. Perubahan ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga tidak dipengaruhi oleh perubahan harga.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang digambarkan dari pertumbuhan indeks harga implisit, disajikan dalam Tabel 11. Pertumbuhan indeks harga implisit berfluktuasi untuk setiap tahunnya dan berfluktuasi juga untuk setiap kelompok konsumsi rumah tangga. Secara umum, peningkatan harga tertinggi terjadi pada tahun 2020 untuk kelompok makanan. Untuk kelompok nonmakanan, rata-rata peningkatan harga tertinggi terjadi pada tahun 2017.

Tabel 11. Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Rokan Hulu (persen), 2016-2020⁴

Kelompok Konsumsi	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,82	2,71	1,91	2,65	4,02
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,25	5,43	1,75	3,61	2,58
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,30	4,33	1,96	2,05	1,48
d. Kesehatan dan Pendidikan	3,88	3,63	0,96	2,43	2,13
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	1,78	0,77	1,52	3,10	1,83
f. Hotel dan Restoran	3,55	4,51	2,05	2,38	1,16
g. Lainnya	4,04	2,31	2,29	3,54	7,17

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

3.3. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peranan konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Selama lima tahun terakhir, peranan komponen ini berada di bawah satu persen. Namun jika dilihat nominal baik ADHB maupun ADHK dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Tabel 12. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (miliar rupiah)	223,82	243,63	275,53	326,05	335,05
b. ADHK (miliar rupiah)	152,96	159,50	173,71	198,95	200,25
Proporsi terhadap PDRB (%)	0,77	0,79	0,85	0,96	0,93

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Walaupun kontribusi LNPRT terhadap total PDRB sangat kecil, namun peranan lembaga ini dalam masyarakat masih sangat dibutuhkan. Kegiatan yang termasuk dalam

⁴ Tingkat perubahan harga produk konsumsi

lingkup LNPRT seperti organisasi masyarakat, organisasi sosial, organisasi keagamaan, dan lain-lain yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

3.4. PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, dan pengeluaran konsumsi akhir LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir suatu perekonomian dalam suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Rokan Hulu dan perkembangannya akan dijelaskan pada Tabel 13.

Secara total, pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB menunjukkan peningkatan, sedangkan untuk ADHK mengalami penurunan. Pada tahun 2016, total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHB sebesar 1.366,53 miliar rupiah dan terus meningkat hingga pada tahun 2020 pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menjadi sebesar 1.631,31 miliar rupiah. Sedangkan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADHK yang semula mengalami peningkatan selama tahun 2016-2019, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 892,54 miliar rupiah. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi penurunan pengeluaran konsumsi akhir pemerintah pada tahun 2020.

Kontribusi pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terhadap PDRB dari tahun 2016-2020 cukup stabil, berada pada kisaran 4 persen. Kontribusi terbesar komponen ini pada tahun 2016 dan 2019 yakni sebesar 4,69 persen. Kemudian turun sedikit di tahun 2020 menjadi 4,52 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan di tahun 2020, akan tetapi secara rata-rata per kapita mengalami penurunan. Pada tahun 2019, konsumsi pemerintah per kapita ADHB sebesar 2,30 juta rupiah dan turun menjadi 2,27 di tahun 2020. Hal ini seirama dengan rata-rata konsumsi pemerintah per kapita ADHK yang juga turun di tahun 2020. Sehingga hal ini membuat laju pertumbuhan per kapitanya mengalami kontraksi.

Tabel 13. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (miliar rupiah)	1 366,53	1 408,21	1 445,67	1 590,74	1 631,31
b. ADHK (miliar rupiah)	930,25	935,98	940,38	966,05	892,54
Proporsi terhadap PDRB (%)	4,69	4,54	4,48	4,69	4,52
Rata-rata Konsumsi Per Kapita					
a. ADHB (juta rupiah)	2,22	2,20	2,17	2,30	2,27
b. ADHK (juta rupiah)	1,51	1,46	1,41	1,40	1,24
Pertumbuhan ⁵					
a. Total Konsumsi Pemerintah	2,21	0,62	0,47	2,73	-7,61
b. Konsumsi Per Kapita	-1,80	-3,27	-3,33	-1,09	-10,98
Jumlah penduduk (orang)	616 466	641 208	666 410	692 120	718 321

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara riil, dilihat dari angka pertumbuhannya. Secara umum, selama periode 2016-2020 pertumbuhan total konsumsi pemerintah berfluktuasi. Bahkan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 7,61. Sedangkan pertumbuhan konsumsi per kapita selama tahun 2016-2020 mengalami kontraksi di kisaran minus satu hingga minus 10 persen dengan kontraksi terbesar pada tahun 2020 sebesar minus 10,98 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk lebih tinggi daripada pertumbuhan konsumsi pemerintah. Dalam kaitannya, berkurangnya cakupan layanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat (publik).

3.5. PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁶. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*)

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK)

⁶ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Secara keseluruhan, pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 pertumbuhan PMTB sebesar 4,36, sempat mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan 2018. Akan tetapi melambat pada tahun 2019 yaitu pertumbuhan PMTB hanya sebesar 3,35 persen hingga mengalami kontraksi sebesar minus 1,74 persen pada tahun 2020. Hal yang sama juga terjadi pada pertumbuhan subkomponen bangunan dan nonbangunan yang mengikuti pola pertumbuhan total PMTB yaitu berfluktuasi setiap tahunnya. Pertumbuhan yang negatif pada subkomponen bangunan dikarenakan pada masa pandemi COVID-19 terjadi penundaan kegiatan pembangunan/perbaikan proyek-proyek pembangunan bangunan tempat tinggal/kantor. Hal ini sejalan dengan komponen nonbangunan yang juga mengalami kontraksi dikarenakan penurunan pembelian kendaraan untuk usaha/kantor.

Tabel 14. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020

U r a i a n	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (miliar rupiah)	7 552,02	8 042,82	8 590,87	9 091,18	9 017,30
b. ADHK (miliar rupiah)	4 295,40	4 493,38	4 743,92	4 902,82	4 817,27
Proporsi terhadap PDRB (%)	25,91	25,95	26,61	26,83	24,99
Struktur PMTB ⁷					
a. Bangunan (miliar rupiah)	3 400,84	3 615,40	3 838,93	4 116,44	4 052,19
(%)	45,03	44,95	44,69	45,28	44,94
b. Non Bangunan (miliar rupiah)	4 151,18	4 427,42	4 751,94	4 974,73	4 965,11
(%)	54,97	55,05	55,31	54,72	55,06
Total PMTB (miliar rupiah)	7 552,02	8 042,82	8 590,87	9 091,18	9 017,30
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan ⁸ (%)					
a. Bangunan	3,52	4,13	5,07	4,26	-1,91
b. Non Bangunan	5,14	5,05	6,04	2,53	-1,59
Total PMTB	4,36	4,61	5,58	3,35	-1,74

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK)

Dilihat dari komposisinya, kontribusi subkomponen non bangunan terhadap total PMTB selalu lebih besar dibandingkan dengan subkomponen bangunan. Pada periode 2016-2020, kontribusi subkomponen non bangunan berada pada kisaran 54-55 persen. Ketika kontribusi bangunan meningkat maka kontribusi nonbangunan mengalami penurunan terhadap total PDRB, dan begitu pula sebaliknya.

3.6. PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk persediaan berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud di sini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari hasil penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antardaerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 15. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (miliar rupiah)	544,26	211,96	314,93	321,94	85,18
b. ADHK (miliar rupiah)	200,34	143,33	117,36	142,86	228,68
Proporsi terhadap PDRB (%)	1,87	0,68	0,98	0,95	0,24

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis secara rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsinya dalam

PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tabel 15 terlihat bahwa nilai perubahan inventori di Kabupaten Rokan Hulu mengalami fluktuasi setiap tahunnya dan angkanya selalu positif. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap tahunnya selalu terjadi penambahan persediaan barang di Kabupaten Rokan Hulu. Pada periode 2016-2020, perubahan inventori terbesar terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 544,26 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar 1,87 persen terhadap total PDRB dan terendah pada tahun 2020 sebesar 85,18 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar 0,24 persen.

3.7. PERKEMBANGAN NET EKSPOR

Net ekspor antardaerah didefinisikan sebagai ekspor dikurangi impor. Berbeda dengan penghitungan ekspor impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor impor antardaerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang dan besaran volume dalam transaksi tersebut. Keterbatasan data seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor impor antardaerah dijadikan sebagai *item* penyeimbang (residual), yakni selisih antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor juga hasilnya dapat memiliki dua angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda positif berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya. Dalam kaitannya apabila net ekspor bernilai positif maka terjadi surplus pada neraca perdagangan. Hal itu berarti terjadi aliran devisa masuk. Sebaliknya apabila net ekspor bernilai negative maka terjadi defisit pada neraca perdagangan yang mengindikasikan terjadi aliran devisa keluar.

**Tabel 16. Perkembangan dan Struktur Net Ekspor
Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor					
a. ADHB (miliar rupiah)	555,50	603,79	-147,31	-635,91	1 265,72
b. ADHK (miliar rupiah)	3 944,78	4 270,73	4 388,20	4 860,15	5 406,36
Proporsi terhadap PDRB (%)	1,91	1,95	-0,46	-1,88	3,51

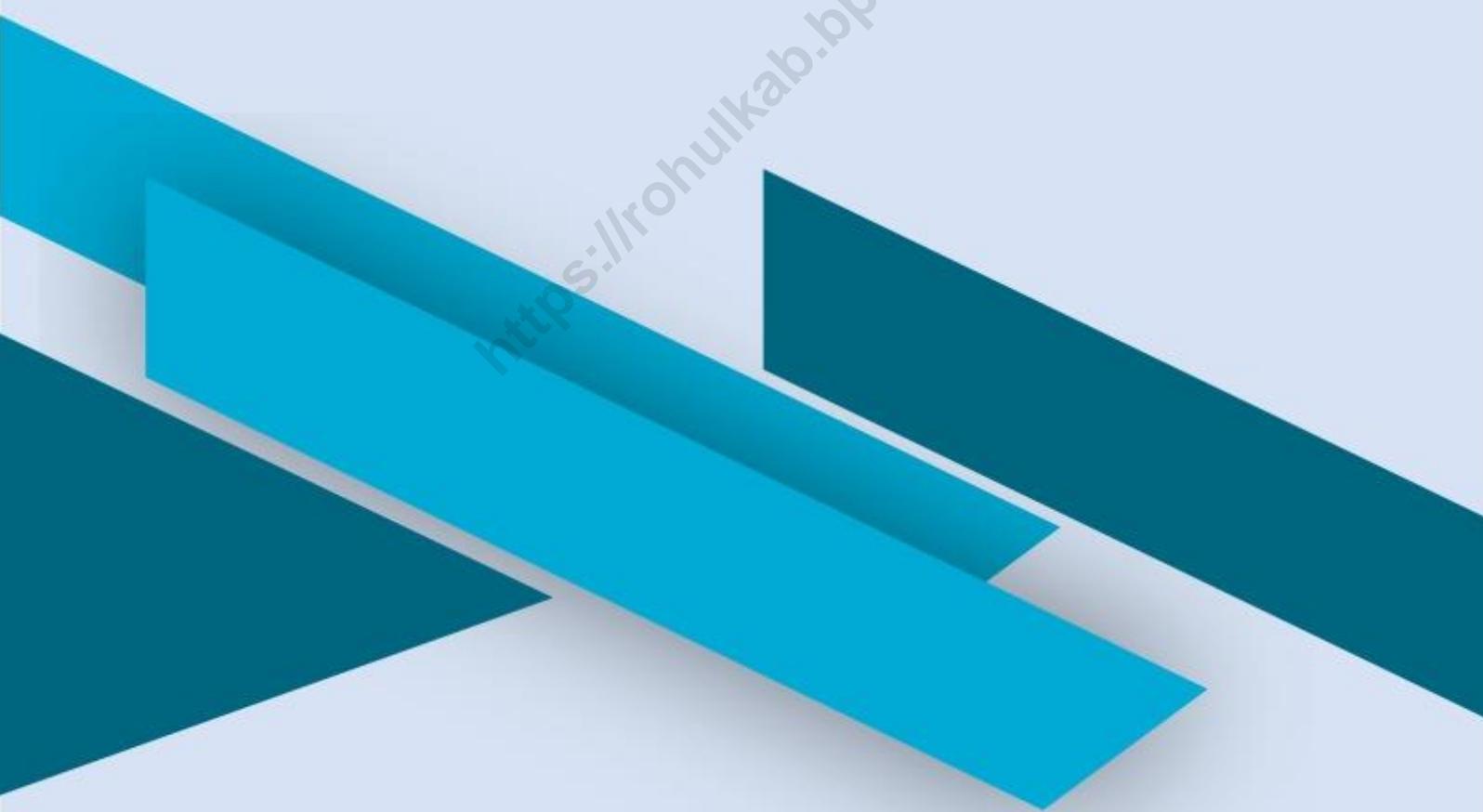
*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Pada tabel 16 terlihat bahwa nilai net ekspor berdasarkan harga konstan (ADHK) terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Sedangkan menurut ADHB nilai net ekspor berfluktuatif selama lima tahun terakhir. Setelah dua tahun sebelumnya net ekspor bernilai negatif, pada tahun 2020 net ekspor mampu bernilai positif. Hal itu berarti nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor dan terjadi surplus dalam neraca perdagangan. Hal ini tidak terlepas dari peran beberapa perusahaan kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan permintaan luar negeri terhadap CPO (*Crude Palm Oil*) meningkat. Pada periode 2016-2020, nilai net ekspor terbesar terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 1.265,72 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar 3,51 persen terhadap total PDRB dan terendah pada tahun 2019 sebesar minus 635,91 miliar rupiah dengan kontribusi sebesar minus 1,88 persen.

BAB IV
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB
KABUPATEN ROKAN HULU
MENURUT PENGELUARAN
2016-2020

<https://rohulkab.bps.go.id>



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1. PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, namun di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan.

Tabel 17. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (miliar rupiah)					
- ADHB	29 145,61	30 992,30	32 290,19	33 882,24	36 083,71
- ADHK	21 792,97	22 965,45	23 925,69	25 101,65	25 479,88
PDRB perkapita (juta rupiah)					
- ADHB	47,28	48,33	48,45	48,95	50,23
- ADHK	35,35	35,82	35,90	36,27	35,47
Pertumbuhan					
PDRB Per Kapita	0,66	1,31	0,24	1,02	(2,20)
Jumlah penduduk (org)	616 466	641 208	666 410	692 120	718 321
Pertumbuhan	4,08	4,01	3,93	3,86	3,79

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB per kapita.

PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan peningkatan pada periode 2016-2020 (Tabel 17). Indikator PDRB per kapita ini menunjukkan bahwa secara ekonomi

setiap penduduk Kabupaten Rokan Hulu rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut.

Di sisi lain, PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 cenderung fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun PDRB per kapita atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan, tetapi sesungguhnya produktivitas riil yang digambarkan oleh PDRB per kapita atas dasar harga konstan justru mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Pada periode 2016-2020, PDRB per kapita Kabupaten Rokan Hulu mengalami kontraksi pertumbuhan pada tahun 2020, sebesar minus 2,20 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi oleh peningkatan total PDRB secara riil. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hulu secara rata-rata meningkat 3,79 persen per tahun, sedangkan PDRB Kabupaten Rokan Hulu hanya mampu tumbuh 1,51 persen. Kondisi ini disebabkan oleh perekonomian Kabupaten Rokan Hulu yang mengalami perlambatan, utamanya akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak pada lesunya ekonomi hampir di semua lapangan usaha.

4.2. PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kabupaten Rokan Hulu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir berkisar antara 70-74 persen. Dari Tabel 18 dapat dilihat bahwa konsumsi akhir makin meningkat setiap tahunnya.

Tabel 18. Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (miliar rupiah)					
a. Rumah tangga	18 903,48	20 481,89	21 810,49	23 188,24	23 749,15
b. LNPRT	223,82	243,63	275,53	326,05	335,05
c. Pemerintah	1 366,53	1 408,21	1 445,67	1 590,74	1 631,31
Jumlah	20 493,84	22 133,72	23 531,69	25 105,04	25 715,51
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	29 145,61	30 992,30	32 290,19	33 882,24	36 083,71
Proporsi	70,32	71,42	72,88	74,09	71,27

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai lebih dari setengah PDRB Kabupaten Rokan Hulu. Namun demikian, kontribusi produk yang tidak digunakan menjadi konsumsi akhir (PMTB atau ekspor luar negeri) di Kabupaten Rokan Hulu masih memiliki peran yang cukup besar. Tetapi hal ini perlu mendapat perhatian dari pihak pemerintah daerah untuk menggali potensi komoditas unggulan lainnya sebagai komoditas ekspor luar negeri, tidak hanya terpaku pada migas dan CPO saja. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga merupakan pertumbuhan ekonomi yang semu.

4.3. INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah *output* (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan *output* adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "nilai tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap *output* atau yang diartikan juga bahwa setiap

pertambahan satu unit nilai *output* (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = *Output* tahun ke t

Y_{t-1} = *Output* tahun ke t-1

**Tabel 19. Incremental Capital Output Ratio
Kabupaten Rokan Hulu, 2016-2020**

Uraian	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK) (miliar rupiah)	21 792,97	22 965,45	23 925,69	25 101,65	25 479,88
Perubahan (miliar rupiah)	992,30	1 172,49	960,24	1 175,95	378,23
PMTB (ADHK) (miliar Rp)	4 295,40	4 493,38	4 743,92	4 902,82	4 817,27
ICOR	4,15	3,66	4,68	4,03	12,96

*) Angka sementara

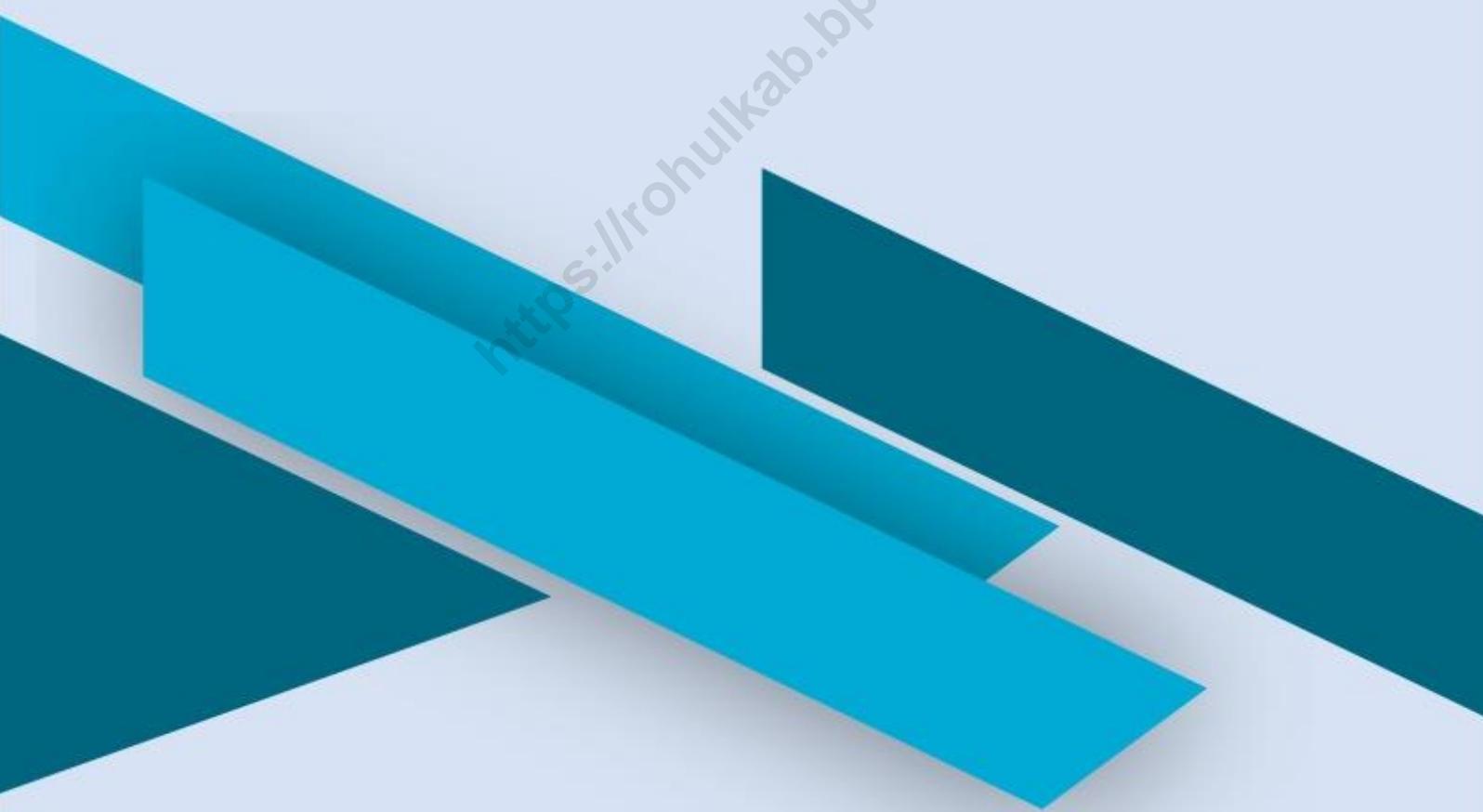
**) Angka sangat sementara

Tabel 19 menunjukkan besaran ICOR Kabupaten Rokan Hulu yang menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Nilai rasio yang dihasilkan juga termasuk tinggi, yakni di atas 3. Hal ini berarti bahwa dibutuhkan investasi yang lebih besar untuk dapat meningkatkan output. Rata-rata ICOR Kabupaten Rokan Hulu yaitu 5,90 yang artinya untuk dapat meningkatkan output sebesar 1 juta rupiah dibutuhkan sekitar 5,90 juta rupiah investasi.

BAB V

PENUTUP

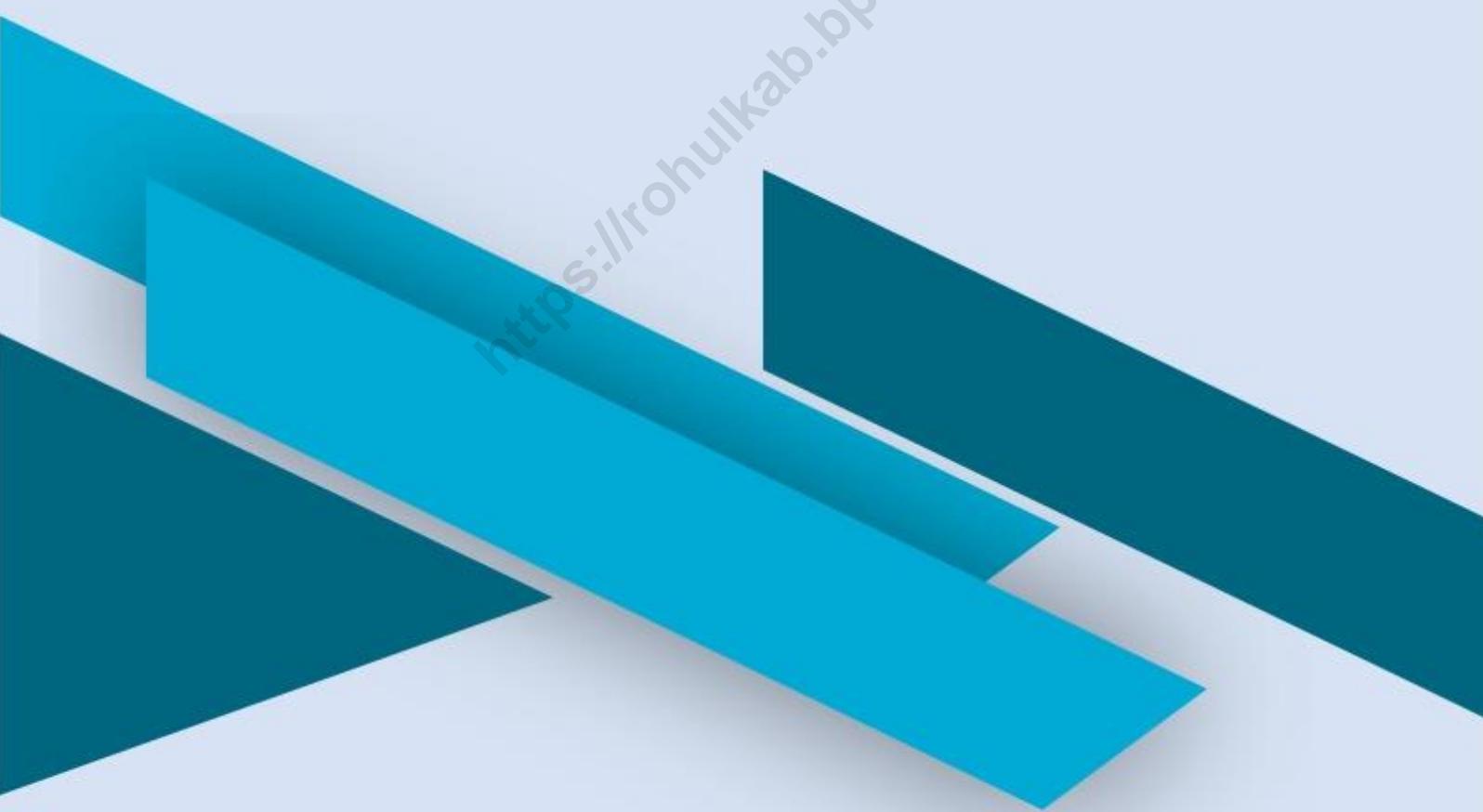
<https://rohulkab.bps.go.id>



1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2016-2020 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Rokan Hulu pada periode tersebut. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antardaerah. Empat sektor institusi atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, perdagangan luar negeri, dan perdagangan antardaerah dengan analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk *series* data dari tahun 2016-2020, sehingga akan mempermudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antarwaktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dan sebagainya) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan *disposable*, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input Output (Tabel I-O), Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).

LAMPIRAN

<https://rohulkab.bps.go.id>



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	18 903 483,72	20 481 888,26	21 810 487,81	23 188 244,71	23 749 148,02
	1.a. Makanan Minuman dan Rokok	8 714 667,42	9 623 460,69	10 469 849,25	11 276 327,06	12 280 368,09
	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	741 782,44	804 770,71	836 725,67	883 794,42	844 526,08
	1.c. Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1 806 969,38	1 974 894,95	2 085 409,91	2 195 152,00	2 229 386,59
	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1 200 525,34	1 286 646,48	1 357 522,76	1 432 710,44	1 537 899,31
	1.e. Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	5 331 062,96	5 596 374,31	5 799 656,91	6 065 489,94	5 629 666,30
	1.f. Hotel dan Restoran	548 058,23	599 893,73	635 740,09	672 268,82	537 034,43
	1.g. Lainnya	560 417,95	595 847,39	625 583,21	662 502,02	690 267,22
2	Konsumsi LNPRT	223 824,89	243 625,46	275 529,04	326 054,97	335 052,22
3	Konsumsi Pemerintah	1 366 527,53	1 408 207,96	1 445 671,08	1 590 738,71	1 631 305,12
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7 552 019,19	8 042 823,51	8 590 874,98	9 091 175,69	9 017 301,68
	4.a. Bangunan	3 400 840,32	3 615 399,52	3 838 932,63	4 116 441,88	4 052 194,92
	4.b. Non-Bangunan	4 151 178,87	4 427 423,98	4 751 942,35	4 974 733,81	4 965 106,76
5	Perubahan Inventori	544 255,58	211 964,88	314 933,52	321 937,83	85 182,20
6	Net Ekspor	555 504,04	603 794,88	(147 311,27)	(635 913,69)	1 265 718,20
	PDRB	29 145 614,95	30 992 304,95	32 290 185,17	33 882 238,22	36 083 707,45

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (juta rupiah), 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	12 269 230,93	12 962 533,80	13 562 124,83	14 030 813,54	13 934 783,93
1.a.	Makanan Minuman dan Rokok	5 592 442,43	6 012 417,81	6 418 532,99	6 734 553,21	7,050,418.32
1.b.	Pakaian dan Alas Kaki	517 287,28	532 315,87	543 953,81	554 551,09	516,574.32
1.c.	Perumahan Perkakas Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1 147 043,45	1 201 576,91	1 244 433,47	1 283 546,71	1,284,548.50
1.d.	Kesehatan dan Pendidikan	837 864,85	866 552,26	905 621,84	933 092,12	980,715.03
1.e.	Transportasi Komunikasi Rekreasi dan Budaya	3 355 242,95	3 495 166,05	3 567 757,30	3 619 011,83	3,298,707.89
1.f.	Hotel dan Restoran	375 745,16	393 517,91	408 668,35	422 113,54	333,336.25
1.g.	Lainnya	443 604,81	460 987,01	473 157,06	483 945,05	470,483.63
2	Konsumsi LNPRT	152 960,33	159 495,16	173 706,18	198 945,69	200 246,04
3	Konsumsi Pemerintah	930 254,59	935 983,34	940 382,47	966 054,91	892 538,92
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 295 399,50	4 493 376,04	4 743 924,62	4 902 819,50	4 817 267,22
4.a.	Bangunan	2 055 796,34	2 140 628,61	2 249 111,12	2 344 965,63	2,300,100.51
4.b.	Non-Bangunan	2 239 603,16	2 352 747,42	2 494 813,50	2 557 853,88	2,517,166.71
5	Perubahan Inventori	200 337,15	143 330,87	117 359,32	142 861,50	228 679,76
6	Net Ekspor	3 944 784,43	4 270 732,87	4 388 196,65	4 860 152,16	5 406 361,10
PDRB		21 792 966,93	22 965 452,09	23 925 694,06	25 101 647,29	25 479 876,97

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Tabel 3. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	64,86	66,09	67,55	68,44	65,82
	1.a. Makanan, Minuman dan Rokok	29,90	31,05	32,42	33,28	34,03
	1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,55	2,60	2,59	2,61	2,34
	1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,20	6,37	6,46	6,48	6,18
	1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,12	4,15	4,20	4,23	4,26
	1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	18,29	18,06	17,96	17,90	15,60
	1.f. Hotel dan Restoran	1,88	1,94	1,97	1,98	1,49
	1.g. Lainnya	1,92	1,92	1,94	1,96	1,91
2	Konsumsi LNPR	0,77	0,79	0,85	0,96	0,93
3	Konsumsi Pemerintah	4,69	4,54	4,48	4,69	4,52
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	25,91	25,95	26,61	26,83	24,99
	4.a. Bangunan	11,67	11,67	11,89	12,15	11,23
	4.b. Non-Bangunan	14,24	14,29	14,72	14,68	13,76
5	Perubahan Inventori	1,87	0,68	0,98	0,95	0,24
6	Net Ekspor	1,91	1,95	(0,46)	(1,88)	3,51
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	6,05	5,65	4,63	3,46	(0,68)
1.a.	Makanan, Minuman dan Rokok	8,41	7,51	6,75	4,92	4,69
1.b.	Pakaian dan Alas Kaki	5,35	2,91	2,19	1,95	(6,85)
1.c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	5,59	4,75	3,57	3,14	0,08
1.d.	Kesehatan dan Pendidikan	6,18	3,42	4,51	3,03	5,10
1.e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	2,66	4,17	2,08	1,44	(8,85)
1.f.	Hotel dan Restoran	5,24	4,73	3,85	3,29	(21,03)
1.g.	Lainnya	5,91	3,92	2,64	2,28	(2,78)
2	Konsumsi LNPRT	2,44	4,27	8,91	14,53	0,65
3	Konsumsi Pemerintah	2,21	0,62	0,47	2,73	(7,61)
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,36	4,61	5,58	3,35	(1,74)
4.a.	Bangunan	3,52	4,13	5,07	4,26	(1,91)
4.b.	Non-Bangunan	5,14	5,05	6,04	2,53	(1,59)
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-
	PDRB	4,77	5,38	4,18	4,92	1,51

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (2010=100), 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	154,07	158,01	160,82	165,27	170,43
1.a.	Makanan, Minuman dan Rokok	155,83	160,06	163,12	167,44	174,18
1.b.	Pakaian dan Alas Kaki	143,40	151,18	153,82	159,37	163,49
1.c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	157,53	164,36	167,58	171,02	173,55
1.d.	Kesehatan dan Pendidikan	143,28	148,48	149,90	153,54	156,81
1.e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	158,89	160,12	162,56	167,60	170,66
1.f.	Hotel dan Restoran	145,86	152,44	155,56	159,26	161,11
1.g.	Lainnya	126,33	129,25	132,21	136,90	146,71
2	Konsumsi LNPRT	146,33	152,75	158,62	163,89	167,32
3	Konsumsi Pemerintah	146,90	150,45	153,73	164,66	182,77
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	175,82	178,99	181,09	185,43	187,19
4.a.	Bangunan	165,43	168,89	170,69	175,54	176,17
4.b.	Non-Bangunan	185,35	188,18	190,47	194,49	197,25
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-
	PDRB	133,74	134,95	134,96	134,98	141,62

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Rokan Hulu Menurut Pengeluaran (persen), 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*)	2020**)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Konsumsi Rumah Tangga	3,13	2,55	1,78	2,77	3,12
1.a.	Makanan, Minuman dan Rokok	3,82	2,71	1,91	2,65	4,02
1.b.	Pakaian dan Alas Kaki	3,25	5,43	1,75	3,61	2,58
1.c.	Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	3,30	4,33	1,96	2,05	1,48
1.d.	Kesehatan dan Pendidikan	3,88	3,63	0,96	2,43	2,13
1.e.	Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	1,78	0,77	1,52	3,10	1,83
1.f.	Hotel dan Restoran	3,55	4,51	2,05	2,38	1,16
1.g.	Lainnya	4,04	2,31	2,29	3,54	7,17
2	Konsumsi LNPRT	4,17	4,39	3,84	3,32	2,09
3	Konsumsi Pemerintah	14,79	2,42	2,18	7,11	11,00
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	18,72	1,81	1,17	2,39	0,95
4.a.	Bangunan	12,02	2,10	1,06	2,85	0,36
4.b.	Non-Bangunan	24,84	1,53	1,22	2,11	1,42
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-
	PDRB	3,39	0,91	0,01	0,01	4,92

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN ROKAN HULU

Jl. Kelompok Tani No. 7 Pasir Pengaraian 28557

Telp.: (0762) 7392150, Fax. (0762) 7392150

Homepage: <https://rohulkab.bps.go.id>. Email: bps1407@bps.go.id

ISBN 978-602-5462-62-7



9 786025 462627